

PANEL PENASEHAT INDEPENDEN TANGGUH

LAPORAN PERTAMA

PROYEK LNG TANGGUH

SEPTEMBER 2002

DAFTAR ISI

I.	<u>Ringkasan dan Rekomendasi Pokok</u>	1
II.	<u>Pendirian Panel dan Ruang Lingkup Laporan</u>	6
III.	<u>Latar Belakang Politik</u>	10
IV.	<u>Gambaran Umum</u>	13
V.	<u>Perlunya Manfaat yang Nyata dan Besar Dalam Jangka Dekat</u>	17
VI.	<u>Pengembangan Masyarakat</u>	20
VII.	<u>Keamanan</u>	22
VIII.	<u>Pelatihan dan Memberikan Pekerjaan pada Masyarakat Papua</u>	25
IX.	<u>Hubungan Baik dengan Pertamina dan Badan Pelaksana Body (“Balak”) Baru</u>	27
X.	<u>Menangani Kegiatan Konstruksi</u>	28
XI.	<u>Lingkungan Hidup</u>	30
XII.	<u>Informasi Publik</u>	31

I. Ringkasan dan Rekomendasi Pokok

Panel Penasehat Independen Tangguh didirikan oleh BP dengan tujuan untuk memberikan nasehat eksternal kepada para petinggi pengambil keputusan yang berkaitan dengan aspek-aspek non-komersial Proyek LNG Tangguh. Tangguh adalah proyek yang luar biasa penting bagi BP, Indonesia dan rakyat Papua. Panel tersebut telah diberi akses penuh terhadap informasi proyek guna mendapatkan informasi, agar dapat melakukan pertimbangan dan menghasilkan temuan-temuan.

Panel telah melakukan diskusi secara luas dengan berbagai pihak terkait dari kalangan pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta melakukan kunjungan secara seksama ke lokasi proyek di Papua. Hal ini dimaksudkan untuk mengkaji ulang rencana kegiatan-kegiatan BP dimana harus sesuai dengan norma-norma global yang berlaku dengan baik pada proyek-proyek di negara-negara berkembang.

Laporan ini – yang mana dipandang oleh Panel sebagai tinjauan tahunan yang pertama terhadap proyek – mengevaluasi kemajuan dan perkembangan sebelum kegiatan konstruksi dimulai. Laporan ini mengakui bahwa keadaan dapat berubah ketika Tahap Konstruksi atau Tahap Operasi di mulai, sehingga rekomendasi-rekomendasi yang disarankan bersama ini mungkin perlu disesuaikan juga.

Panel membuat beberapa rekomendasi penting, dimana masing-masing diuraikan secara lebih terperinci sebagaimana dibawah ini.

Gambaran Umum

- Melanjutkan dan mengintensifkan dialog yang telah dimulai BP dengan pemerintah pusat, pimpinan pemerintah daerah di Papua, LSM dan tokoh-tokoh agama.

- Memastikan bahwa komitmen-komitmen yang dibuat oleh perusahaan telah memperjelas perbedaan antara bahan yang sedang dipertimbangkan dan keputusan yang pasti, dan semua manfaat yang dijanjikan secara khusus telah dijelaskan secara tertulis.

Manfaat Pokok dan Nyata Dalam Waktu Dekat

- Memberikan dukungan sedini mungkin dan nyata terhadap Wilayah Kepala Burung dan Propinsi Papua di bidang pendidikan, perawatan kesehatan, pengembangan kapasitas dan pelatihan kerja. Dukungan secara dini dari BP tersebut akan membantu mengurangi hambatan terhadap proyek sebagai akibat dari keterlambatan pendapatan dana Otonomi Khusus.
- Bekerjasama erat serta mengupayakan dukungan dari USAID (Badan Pembangunan Internasional Amerika), DFID (Departemen Pembangunan Internasional Inggris) dan UNDP (Program Pembangunan PBB) untuk menyusun program pengembangan kapasitas pemerintahan di Papua, sehingga pendapatan yang dihasilkan oleh Tangguh di masa depan dapat digunakan dengan sangat efektif.
- Memasuki diskusi dengan Pemerintah Indonesia dan pimpinan di Papua mengenai kemungkinan untuk memperoleh fasilitas kredit dari luar negeri untuk memperlancar aliran penerimaan yang didapat dari proyek kepada Propinsi Papua.

Pengembangan Masyarakat

- Memberikan dukungan langsung untuk memperbaiki fasilitas pendidikan dan pengajaran di Wilayah Kepala Burung untuk pelatihan teknis serta program pendidikan yang lebih tinggi di Manokwari dan Jayapura.
- Memberikan dukungan langsung untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Wilayah Teluk Bintuni, termasuk pengendalian Malaria di DAV (Desa-Desa yang Terkena Dampak Langsung) dan daerah sekitarnya serta memberikan bantuan dana untuk suplai obat-obatan, fasilitas dan personelnnya, khususnya pada saat tahap proyek konstruksi berlangsung.
- Sehubungan dengan pentingnya kesehatan dan pembangunan , maka proyek akan meningkatkan dan memperbaiki prasarana air minum yang dibutuhkan oleh masyarakat di DAV dan daerah sekitarnya.

Keamanan

- Membangun secara fleksibel konsep CBS (Keamanan Berdasarkan Masyarakat) , mengingat bahwa pendekatan ini harus dipadukan dengan tugas TNI dalam melindungi aset vital nasional.
- Melakukan konsultasi tingkat tinggi dengan pejabat-pejabat politik senior, militer dan polisi tentang pelaksanaan konsep tersebut, dengan tujuan (jika memungkinkan) untuk menetapkan hal ini sebagai dasar untuk bekerja sama dengan pejabat-pejabat tersebut sebelum suatu keputusan final dibuat oleh BP untuk terus melanjutkan Proyek ini..
- Mendukung program yang menyediakan training bagi militer dan polisi, seperti yang dijalankan oleh ICRC (Komite Internasional Palang Merah).

- Menentang permintaan dana secara langsung dari TNI atau Polisi

Pelatihan dan Mempekerjakan Penduduk Papua

- Melanjutkan pelatihan ketrampilan khusus kepada penduduk setempat seperti misalnya pertukangan kayu.
- Melaksanakan program penerimaan tenaga kerja dan pelatihan untuk penduduk Papua di daerah untuk membantu mewujudkan janji tentang penawaran satu pekerjaan bagi setiap keluarga di DAV atau desa-desa yang terkena dampak langsung.
- Mendukung modernisasi armada penangkapan ikan lokal dengan menyediakan bantuan berupa kapal yang lebih baik dan peralatan lainnya.

Hubungan Baik dengan Pertamina dan Balak (Badan Pelaksana) Baru

- Memperkuat dan mengembangkan hubungan baik dengan pejabat senior Pertamina dalam rangka menjaga stabilitas hubungan yang telah berlangsung selama ini.
- Memantau secara dekat dan membangun hubungan baik dengan pejabat-pejabat di Badan Pelaksana yang akan mengawasi kegiatan Tangguh mulai bulan November 2003.

Penanggulangan Dampak pada Tahap Konstruksi

- Mengikuti program-program yang telah dirancang guna membatasi aktifitas-aktifitas pekerja konstruksi diluar waktu kerja di dalam maupun disekitar Teluk Bintuni .
- Berhubungan dengan para kontraktor untuk menegaskan pentingnya kebijakan tersebut dan memastikan bahwa para kontraktor mematuhi etika tingkah laku perusahaan.

- Memberikan program-program penyuluhan kepada penduduk desa di semua desa yang terkena dampak beserta daerah-daerah sekitarnya tentang bahaya penyakit menular, alkohol dan penggunaan narkotika.

Lingkungan Hidup

- Menjaga dan menyelamatkan keanekaragaman hayati di daerah proyek dan mendukung kepeloporan program aksi keanekaragaman hayati di Cagar Alam.
- Mendukung kegiatan pemantauan lingkungan untuk memastikan bahwa proyek melakukan pengelolaan lingkungan yang tepat, dan melindungi Teluk Bintuni dari penurunan kualitas air serta dampak lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan perairan dan mata pencaharian dari masyarakat setempat.
- Melaksanakan semua persyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen AMDAL dengan tepat waktu.
- Memiliki komitmen untuk memindahkan semua fasilitas BP beserta peralatannya pada Tahap Paska Operasi dan melakukan pengelolaan terhadap dampak penurunan kualitas tanah.

Informasi Publik

- Membuat dan menyebarkan bahan-bahan tentang informasi proyek dan program-program BP untuk memberikan informasi yang tepat dan menghindari salah persepsi dan ketidakbenaran.

II. Pendirian Panel dan Ruang Lingkup Laporan

Pada permulaan tahun 2002, BP mendirikan Panel Penasehat Independen untuk memberikan masukan eksternal, saran serta keyakinan kepada BP yang berhubungan dengan Proyek LNG Tangguh di Papua, Indonesia. Anggota Panel terdiri dari Senator George Mitchell dari Amerika, Lord David Hannay of Chiswick dari Inggris, Duta Besar Sabam Siagian dari Jakarta dan Pendeta Herman Saud dari Jayapura.

Panel tersebut bertugas memberikan nasehat kepada BP untuk bagaimana Tangguh dapat mendorong potensinya menjadi model kelas dunia bagi pembangunan, dengan memperhitungkan khususnya : dampak proyek terhadap penduduk setempat; dampak terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati; dampak terhadap kondisi politik, ekonomi dan sosial di Indonesia secara umum serta di Papua pada khususnya; dan mengevaluasi *country risk* Indonesia dan Papua.

Panel telah diminta untuk menyampaikan laporan awalnya kepada BP Group Chief Executive, yang berisikan latar belakang terperinci yang dijelaskan oleh BP Indonesia serta Tim Tangguh beserta kunjungan panjangnya ke Indonesia, termasuk ke Jakarta, Jayapura, wilayah Teluk Bintuni dan Tambang Freeport McMoran beserta fasilitas terkaitnya. Panel bertemu dengan berbagai lapisan masyarakat Indonesia secara luas, pejabat-pejabat pemerintah Amerika dan Inggris, pimpinan pemerintahan yang terpilih dari Jakarta, Jayapura, Manokwari dan Aranday, tokoh-tokoh desa di Tanah Merah dan Taroy, LSM di London, Jakarta dan Papua serta dengan banyak masyarakat yang terkena dampak. Panel menggunakan komite hukum independen, dan diberikan akses penuh terhadap semua informasi yang diminta, serta kebebasan penuh untuk mengadakan penyelidikan dan penemuan-penemuan. Kesimpulan dan rekomendasi yang disampaikan dalam laporan merupakan hasil penulisan yang mereka susun sendiri.

Proyek Tangguh mempunyai arti yang sangat penting bagi Indonesia dan Papua, dikarenakan besarnya dan waktu keberlangsungannya. Setelah lebih dari 30 tahun, diharapkan pemerintah pusat dapat menerima lebih dari US \$8.7 milyar dari proyek Tangguh, dan pemerintah daerah Papua akan menerima US\$3.6milyard. Selama periode puncak tersebut, diestimasikan pada 2011 hingga 2022 berdasarkan jadwal operasi yang ada saat ini, lebih kurang US\$225 juta setiap tahunnya akan mengalir dari Tangguh ke Pemerintah Propinsi Papua; pada saat ini, anggaran total Propinsi Papua berkisar antara US\$190 juta. Indonesia telah menjadi eksportir LNG terbesar di dunia, telah mengekspor 27 juta metric tons LNG dengan nilai total mencapai US\$6.8 milyar pada tahun 2000, namun produksi sedang mengalami penurunan di Lapangan Arun yang dioperasikan oleh Exxon Mobil. Oleh karena itu Proyek Tangguh merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk tetap menjadi salah satu eksportir terbesar di dunia. Sebagai tambahan, Tangguh akan menjadi investasi asing terbesar di Indonesia sejak krisis ekonomi dan turunnya Presiden Suharto di tahun 1998.

Selanjutnya, Tangguh akan menjadi proyek pertama yang terpengaruh oleh Undang-undang Otonomi Khusus Papua. dimana pendapatan (setelah dikurangi pajak) yang dihasilkan oleh proyek akan dibagi dan hasil minyak pertama (*first tranche petroleum*), akan diserahkan kepada pemerintah pusat. Setelah itu, pembagian antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Papua akan didasarkan formula baru yang mengalokasikan 70% dari pendapatan kepada daerah dan 30% kepada pemerintah pusat.

Proyek ini mempunyai peran yang sangat penting bagi wilayah Teluk Bintuni di Kepala Burung Propinsi Papua. Di wilayah ini hanya terdapat tiga kota besar, yang masing-masing berjarak lebih dari 100 kilometer dari lokasi Tangguh. Wilayah disekitar lokasi proyek adalah teluk yang luas dan cukup murni, dengan adanya hutan mangrove yang diperkirakan terbesar di

dunia. Daerah ini dianggap sebagai salah satu ekosistem laut yang mempunyai keanekaragaman terbesar di dunia.

Teluk Bintuni dikelilingi oleh hutan perawan yang sangat luas, namun di beberapa bagian telah rusak akibat kegiatan penebangan kayu (legal dan ilegal) serta pembukaan pekebunan kelapa sawit dan pembibitan pohon sagu. Masyarakat yang tinggal di sekitar teluk, menghuni desa terpencil yang terdiri dari 30 hingga 100 kepala keluarga. Mereka hidup dalam rumah kayu primitif dengan nipa atau seng sebagai atapnya serta dapur dan fasilitas kamar mandi terdapat di luar rumah. Desa-desanya tersebut telah dialiri listrik dan terdapat beberapa satelit parabola; dan paling sedikit terdapat satu desa yang mempunyai tempat penyewaan DVD sebagai bentuk usaha kecil. Sebagian besar pria di desa-desanya tersebut terlibat dalam usaha penangkapan udang, menggunakan sampan yang sebagian besar tidak menggunakan motor. Banyak anak-anak di desa dan anak-anak usia sekolah berangkat ke sekolah yang ada di desa tersebut setiap paginya. Semua desa mempunyai tempat ibadah, termasuk masjid, gereja Katolik dan gereja Protestan.

Wilayah Teluk Bintuni mempunyai beberapa kota kecil, yaitu Babo (di sebelah selatan laut) dan Aranday (di sebelah utara laut) yang sangat dekat dengan lokasi proyek. Masyarakat di daerah-daerah tersebut lebih padat dan lebih komersial dibandingkan dengan desa-desanya lainnya. Di kedua daerah tersebut juga terdapat perkantoran pemerintah daerah, yang dijalankan oleh Kepala Distrik. Daerah tersebut juga mempunyai SMP (Sekolah Menengah Pertama) serta Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat). Transportasi dilakukan menggunakan perahu atau helikopter sehubungan dengan tidak adanya jalan yang menghubungkan antar kota-kota kecil atau ke desa-desanya tersebut. Babo akan menjadi lokasi Base camp bagi kegiatan konstruksi BP, dengan berbagai fasilitas konstruksi termasuk pelabuhan laut dan bandar udara yang baru.

Tangguh merupakan proyek yang sangat penting di Papua setelah kompleks pertambangan Freeport McMoran Gold and Copper, yang mana mulai beroperasi di Tambang Ertsberg sejak tahun 1973 dan dikembangkan secara signifikan pada akhir tahun 1980, dengan ditemukannya Tambang Grasberg. Freeport sekarang telah mempekerjakan lebih dari 14.000 orang. Tangguh merupakan proyek terbesar yang pernah ada di wilayah Barat Laut Kepala Burung Papua, dan oleh karena adanya perdebatan tentang masalah-masalah keamanan, hak asasi manusia dan dampak lingkungan dari Proyek Freeport, maka Proyek Tangguh disambut sebagai pola baru untuk mengatasi kekhawatiran akan kerjasama internasional sebagai akibat pengalaman masa lalu di Papua.

Panel juga meninjau ulang proposal BP yang berhubungan dengan kepedulian terhadap norma-norma global saat ini yang telah menjadi panduan umum bagi proyek-proyek di negara-negara berkembang. Standar-standar yang digunakan telah dikonsultasikan dengan Lembaga Hak Asasi Manusia, Perburuhan, Keamanan dan Lingkungan Hidup, termasuk juga secara khusus, Deklarasi Universal tentang HAM (*the Universal Declaration of Human Rights*), Konvensi dari Organisasi Buruh Internasional tentang Suku-suku dan Masyarakat Terasing di Dalam Negara-negara Berdaulat (*the International Labour Organisation Convention Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries*), Petunjuk Operasional Bank Dunia tentang Kepedulian Terhadap Masyarakat Terasing (*the World Bank Operational Directive with respect to Indigenous Peoples*), Kebijakan dan Panduan Bank Dunia dan IFC yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Habitat (*World Bank and IFC policies and guidelines regarding environmental operations and protection of natural habitats*) dan Organisasi Standarisasi “ISO 14000” Sistem Manajemen Lingkungan (*the International Organization for Standardization "ISO 14001" Environmental Management Systems*).

Kepatuhan BP terhadap hukum di Indonesia berada diluar wewenang penyelidikan Panel, namun dapat dipastikan (dijamin) bahwa semua peraturan ditingkat nasional dan daerah akan dipatuhi.

III. Latar Belakang Politik

Dalam bidang politik, Indonesia telah melewati perjalanan besar sejak kejatuhan Presiden Suharto pada tahun 1998. Dalam masa ini merupakan tahap awal dalam demokratisasi Hal iniberkaitan dengan masa lalu ketika militer sangat kuat dan mandiri, dan dimana terdapat dua kekuatan pokok di Indonesia yaitu nasionalisme dan Islam.

Hal terpenting bagi BP adalah terjalinnya hubungan baik antara Jakarta dengan Papua, namun kebijakan politik di Aceh juga menarik untuk dipelajari. . Pemerintah pusat telah menyusun Undang-undang Otonomi Khusus bagi dua propinsi yang secara geografis berbeda sangat jauh. Undang-undang ini membawa unsur federalisme (distribusi kekuasaan) dan pembagian pendapatan dari pengembangan sumber daya alam. Namun di Aceh, Otonomi Khusus diterapkan terlalu lambat untuk menghindari kekerasan. Lebih dari 20.000 tentara disiagakan di sekitar lokasi operasi kilang Gas Exxon Mobil Arun, dengan banyak fatalitas setiap minggunya; Pasukan Islam radikal dan tentara separatis disini aktif dan merupakan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan Indonesia.

Disisi lain, Otonomi Khusus di Papua lebih merupakan respon Jakarta terhadap tekanan dari pihak separatis, dan juga untuk mengurangi aktivitas gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang kurang diorganisir dibandingkan dengan separatis di Aceh. Hal yang dijanjikan dalam Otonomi Khusus adalah memberikan wewenang okal melalui pemilihan gubernur dan anggota dewan legislative; penghormatan terhadap budaya dan adat setempat; dan

juga kemandirian dalam hal mengalokasikan pendapatan, pinjaman, pendidikan dan kesehatan. Diharapkan hal-hal tersebut dapat menghindari kekerasan yang ditimbulkan oleh para separatis, seperti kekerasan yang melanda Aceh dan merundung operasi Exxon Mobil. Otonomi Khusus merupakan dokumen konstitusional yang memantapkan struktur pemerintah Papua dan juga cara-cara berhubung dengan Jakarta. Untuk melaksanakannya secara penuh, pemerintah pusat dan daerah masih memerlukan peraturan tambahan. Kemungkinan terbaiknya, semua akan berjalan tepat waktu, kemungkinan terburuknya, maka tidak akan bisa dilaksanakan secara penuh dan akan menyebabkan kegagalan tujuan politik.

Otonomi khusus pada saat ini didukung oleh sebagian besar penguasa politik di Papua dengan beberapa catatan: otonomi khusus ini dipandang sebagai sebuah ujian yang dapat dinilai di masa mendatang untuk mengetahui apakah pembagian kekuasaan dan keuangan dibagi secara tulus dan sungguh-sungguh, atau tidak. Pada saat ini, masih belum jelas apakah penerapan Otonomi Khusus akan dilaksanakan dengan cara yang dapat memuaskan keinginan politik masyarakat Papua. Sampai sekarang, pelaksanaan Otonomi Khusus umumnya dipandang lambat. Perhatian Jakarta mungkin akan beralih. Untuk alasan ini, maka Otonomi Khusus mungkin dapat menjadi faktor positif jika dilaksanakan secara penuh dan tepat waktu; namun, BP sebaiknya tidak terlalu bergantung kepada pelaksanaan Otonomi Khusus sebagai jawaban terhadap kebutuhan-kebutuhan rakyat Papua.

Salah satu ukuran mengenai kepedulian masyarakat Papua tentang kesuksesan Otonomi Khusus adalah penyelidikan kasus kematian Theys Eluay, seorang pemimpin karismatik Presidium Dewan Papua (sebuah dewan yang damai namun pro-kemerdekaan). Hampir setiap orang Papua yang kami bertemu sempat mengangkat persoalan ini. ini. Dipercayai luas di Papua

bahwa unsur dari Komando Pasukan Khusus melakukan pembunuhan terhadap Eluay setelah dia meninggalkan jamuan makan malamnya di markas setempat di dekat Jayapura.

Penanganan kasus ini oleh Jakarta dipandang oleh sebagian besar elemen politik Papua sebagai ujian pertama bagi hubungan yang baru. Dan karena itu rakyat Papua memutuskan tidak menyampaikan penilaian tentang hubungan tersebut hingga kasus tersebut dapat diselesaikan. Pimpinan baru TNI telah mengumumkan bahwa satu perwira TNI terlibat secara langsung terhadap kematian Eluay, dan terdapat sepuluh anggota TNI akan disidangkan terkait dengan pembunuhan tersebut. Kasus ini menggarisbawahi keretakan hubungan politik Indonesia / Papua dan peran vital yang dapat dimainkan oleh TNI untuk memperbaiki hubungan tersebut atau menciptakan ketidakstabilan.

Lebih rumit lagi, ancaman baru terhadap stabilitas dan keamanan di Papua yang datang dari kelompok-kelompok radikal dari luar wilayah Kepala Burung dengan membawa agenda khusus mereka. Meskipun tidak secara langsung berhubungan dengan proyek, hal tersebut menimbulkan ketidakstabilan dan berpotensi memunculkan kekerasan dan peningkatan operasi militer di daerah ini.

Keputusan yang berkaitan dengan Tangguh harus dibuat dalam konteks lingkungan pergaulan politik dan budaya yang baru, dinamis dan dalam situasi yang tidak dapat diramalkan. Dengan adanya Otonomi Khusus, maka hal ini akan memberikan kesempatan, karena dapat menghindari pengulangan pendekatan militer yang telah gagal di masa lalu, seperti yang terjadi di Exxon Mobil di Aceh. Tetapi juga menghasilkan tantangan dimana BP akan dapat memainkan perannya secara terbatas untuk meredakan konflik, dengan meningkatkan taraf hidup dan masa depan bagi anak-anak, membangun kemampuan pemerintah propinsi dan kabupaten,

dan mendorong solusi yang demokratik serta damai untuk menyelesaikan konflik. Panel percaya bahwa BP dapat dan seharusnya memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan tersebut.

IV. Gambaran Umum

Secara umum, Panel menemukan reaksi positif dari Jakarta, Jayapura dan wilayah Bintuni terhadap proyek. Dengan hanya beberapa pengecualian, pejabat pemerintah, LSM dan penduduk setempat menyambut baik kehadiran proyek sebagai manfaat bagi Papua. Mereka juga menerima dengan terbuka proses konsultasi BP hingga saat ini dan jaminannya bahwa kebutuhan mereka akan ditanggapi. Kelompok-kelompok ini, terutama di tingkat Propinsi Papua, mengatakan kepada kami bahwa ada perbedaan tajam dengan pengalamannya dengan Freeport.

Namun, proses ini telah menimbulkan “tonggak harapan” di semua tingkatan dan tidak sabar lagi untuk merealisasi manfaatnya. Sebagai akibatnya, ketidakpastian yang berkaitan dengan keuntungan yang dijanjikan Proyek atau adanya penundaan pelaksanaannya akan dipandang sebagai ingkar janji. Hal ini dapat mengorbankan kemajuan yang tercapai saat ini melalui kemauan baik dan kerja keras. Resiko yang serius dalam waktu dekat dapat terjadi dari beberapa penundaan proyek yang disebabkan oleh faktor-faktor komersial. Adalah merupakan hal penting bahwa BP perlu berusaha memperjelas apa yang sedang diajukannya (secara tulis jika memungkinkan) dan menindaklanjuti janjinya dengan tepat waktu.

Kehadiran BP pada saat ini telah menyebabkan berbagai permintaan (dari *stakeholder*) yang meningkat secara terus-menerus, . Sebagai contoh, keputusan untuk menyediakan rumah baru bagi penduduk Desa Tanah Merah yang secara fisik harus dipindahkan, telah memicu permintaan yang sama dari penduduk desa di pantai sebelah utara.

Disamping itu, telah muncul ketegangan-ketegangan tentang alokasi pendapatan yang dihasilkan oleh proyek – antara Propinsi Papua, Wilayah Kepala Burung dan desa-desa di bagian utara dengan desa-desa di pantai bagian selatan Teluk Bintuni. Semuanya berharap untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Meskipun BP tidak mampu mengendalikan alokasi penerimaan tersebut, namun BP tetap memiliki kepentingan vital untuk menjamin bahwa: Pertama, terlaksananya pembagian 70/30 yang tersirat dalam Otonomi Khusus agar dapat dilaksanakan secepatnya, tepat, dan transparan; Kedua, alokasi penerimaan antara DAV dan wilayah Kepala Burung serta Propinsi Papua diberlakukan dengan adil dan dengan alasan yang tepat untuk menghindari ketidak seimbangan yang dapat menimbulkan perselisihan; dan Ketiga, dimulainya aliran penerimaan dan dimulainya pembangunan sesuai dengan jadwal Proyek BP.

Tidaklah tepat dan tidaklah juga menolong bagi Panel untuk berspekulasi tentang stabilitas ekonomi dan politik Indonesia maupun Papua jangka panjang. dalam beberapa dekade selama umur proyek. Namun cukup jelas bahwa hubungan baik antara Papua dan Indonesia tidak dapat diramalkan dalam jangka waktu panjang. Ada kekuatan yang dapat mempengaruhi status politik Papua – kemungkinan setelah pemilu berikutnya di Indonesia pada tahun 2004, atau setelah berakhirnya tahap pertama Otonomi Khusus tahun 2005. Dengan demikian, penting bagi BP untuk terus memantapkan struktur yang berkelanjutan yang dapat mengikuti proses perubahan politik yang terjadi. Struktur tersebut harus memanfaatkan semua elemen-elemen politik utama yang ada, dengan demikian diharapkan dapat mengurangi keinginan beberapa kelompok untuk mengganggu jalannya proyek. Panel percaya bahwa pelaksanaan Otonomi Khusus dengan tepat waktu dan dapat membangun sebuah struktur yang secara signifikan akan mengurangi resiko dari ketidakstabilan di Papua.

Isu yang dianggap mempunyai sensitivitas tinggi adalah kehadiran dan keterlibatan militer Indonesia dalam pengamanan proyek-proyek vital nasional, serta ketakutan dan keresahan rakyat Papua akibat aktivitas militer didaerahnya. Struktur keamanan di Tangguh mungkin berkembang sejalan dengan waktu, namun Panel percaya bahwa penting bagi BP untuk mulai melaksanakan, sejauh mungkin, konsep “Keamanan Berbasis Masyarakat” (*Community-Based Security*, atau ‘CBS’). Panel, menyimpulkan bahwa diperlukan keluwesan dan pendekatan tingkat tinggi dengan TNI dan Polisi dalam waktu dekat sebelum BP pada akhirnya komit untuk melanjutkan proyek. pengaturan keamanan dapat disesuaikan guna memenuhi kebutuhan semua pihak.

Proyek Tangguh akan menjadi proyek konstruksi terbesar yang pernah ada di wilayah Teluk Bintuni. Meski demikian, Panel percaya bahwa, dengan pengembangan yang sesuai, Tangguh dapat mengendalikan dampak lingkungan yang terjadi di ecosystem yang penting ini.. Dengan demikian, dan dengan manfaat besar dapat menggantikan penggunaan batu bara dalam roda perekonomian China dan negara-negara di Asia Selatan, Proyek Tangguh dapat menjadi proyek pengembangan sumber daya alam yang dianggap sebagai sebuah model berkelas dunia. Meski demikian, tetap ada isu penting tentang lingkungan hidup setempat yang harus ditanggapi, terutama berkaitan dengan perlindungan dan pengembangan industri perikanan dan udang di Teluk Bintuni dimana sebagian besar penduduk desa menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut.

Jika perkembangan pasar memicu keputusan untuk menunda Tahap Konstruksi proyek, adalah penting bagi BP untuk menjelaskan latar belakang keputusan dan prospeknya kepada semua pihak yang terpengaruh – Pemerintah Indonesia, para Pemimpin Papua dan masyarakat yang terkena dampak langsung di wilayah Teluk Bintuni. Pada awalnya memang akan muncul

reaksi negatif berupa beberapa kritikan terhadap proyek. Kunci BP dalam menangani reaksi tersebut adalah dengan melanjutkan program-programnya di sektor pendidikan dan kesehatan, serta upaya untuk mengembangkan kapasitas di Papua, supaya struktur dasar bagi penyerapan kenaikan aliran dana pada akhirnya akan benar-benar dirasakan. Penundaan apapun dalam jadwal pengoperasian proyek akan meningkatkan pentingnya rekomendasi Panel berkaitan dengan aliran pendapatan yang tertunda. Rekomendasi ini dapat menjadi informasi tambahan yang penting untuk menjelaskan keputusan terbaru Cina yang berkaitan dengan Impor LNG untuk Terminal Guangdong dan Fujian.

Secara ringkas, Panel menyimpulkan bahwa BP telah melakukan persiapan dasar untuk kebijakan yang menghargai dan memberikan manfaat nyata kepada semua *stakeholder*, termasuk kepada Pemerintah Indonesia, Pemerintah Daerah Papua, beberapa kabupaten di wilayah Kepala Burung dan desa-desa di Teluk Bintuni. Salah satu tantangan bagi BP adalah keperluan untuk menjaga fleksibilitasnya dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan ini secara efektif dalam setiap perubahan situasi. Dalam prakteknya, penting bagi BP untuk memastikan bahwa kebijakannya dilaksanakan dengan baik oleh para kontraktor, dan seharusnya ditandatangani serta bersifat mengikat secara ketat pada Etika Tingkah Laku. Pelaksanaan dilapangan biasanya akan selalu lebih sulit dibandingkan dengan perencanaannya.

Rekomendasi:

- **Melanjutkan dan mengintensifkan dialog yang telah dimulai oleh BP dengan Pemerintah Pusat, Pimpinan Pemerintah Daerah di Papua, LSM dan tokoh-tokoh agama.**
- **Memastikan bahwa komitmen-komitmen yang dibuat oleh perusahaan telah memperjelas perbedaan antara suatu keadaan yang sedang dipertimbangkan dan**

keputusan yang sebenarnya, dan semua manfaat yang dijanjikan secara khusus dikemukakan secara tertulis.

V. Perlunya Manfaat yang Nyata dan Besar Dalam Jangka Dekat

BP Indonesia telah membawa sebagian besar pelaku politik kedalam proses dialog dan konsultasi. Konsultasi merupakan langkah pertama dalam upaya menyusun konsensus dan kesepakatan. Namun demikian, dialog tersebut telah menjadi tonggak bagi harapan-harapan yang dapat berdampak negatif jika diabaikan. Ada beberapa harapan yang, terlihat kurang realistis, berpotensi menjadi gangguan terhadap proyek jika tidak ditangani dengan baik.

Salah satu masalah kunci adalah ‘ketidak-sesuaian’ diantara tanggal mulai Tahap Operasi dan tanggal mulainya aliran pendapatan pembagian hasil bagi Propinsi Papua. Karena dalam pembagian penerimaan keuangan Kontrak Bagi Hasil (PSC), termasuk didalamnya adalah kebutuhan pengembalian biaya dan bagian hasil minyak awal (*first tranche petroleum*) serta kewajiban untuk membayar kembali hutang dan bunganya, dimana hal tersebut akan mengakibatkan aliran penerimaan bagi Papua menjadi kurang signifikan sampai dengan awal 2011, pada saat dimana seharusnya terjadi kenaikan penerimaan yang tinggi. Hal tersebut berbeda dengan jadwal konstruksi dan rencana pengoperasian serta ekspor LNG pertama pada tahun 2006. Oleh karena itu, tanpa langkah proaktif, satu dasawarsa dapat dilewatinya diantara mulainya Tahap Konstruksi dan mulainya aliran pendapatan yang signifikan ke Papua. Selain itu, pendapatan tersebut akan mulai secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar, dengan kekurangan dalam kemampuan untuk menerapannya dengan baik, sehingga akan menimbulkan masalah dalam penggunaannya. Dengan sejarah kegiatan Freeport di Papua dan keraguan masyarakat Papua tentang Otonomi Khusus, penundaan yang panjang ini dapat memancing banyak

ketidakpuasan. Ketidakpuasan tersebut dapat diredakan di tingkat masyarakat jika BP melaksanakan rencana pengembangan masyarakat, namun bagaimanapun akan tetap berada di tingkat propinsi.

Panel percaya ada dua cara bagi BP untuk menangani konsekuensi negatif akibat penundaan penerimaan keuntungan bagi Papua. Pertama, BP dapat memberikan keuntungan dengan memulai mengembangkan programnya dibidang pendidikan, kesehatan, pengembangan kapasitas, pelatihan kerja dan pembangunan berkelanjutan di daerah Kepala Burung. Tujuan dari bantuan awal ini adalah untuk memberikan manfaat nyata dari BP kepada Papua. Kedua, BP dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah Papua dan pemerintah pusat untuk memberikan pinjaman, pendanaan dari luar atau mekanisme lainnya, yang dapat memberikan dana sebelum adanya pendapatan dari penghasilan proyek. Dana pinjaman dapat dibayar kembali nanti dengan pendapatan dari proyek. Ini tidak hanya akan memajukan jadwal aliran pendapatan, tetapi juga dapat memastikan bahwa pendapatan dapat ditingkatkan secara bertahap, supaya aliran tersebut menjadi lebih lancar dan digunakan lebih efektif. Seharusnya adalah mungkin bahwa peminjaman dana tersebut dapat diawasi, sehingga akan memberikan jaminan bahwa dana tersebut benar-benar dibelanjakan untuk fasilitas-fasilitas yang diperlukan dan tidak dibuang percuma atau bahkan paling buruk dialihkan oleh pemerintah setempat menjadi hal-hal yang tidak efektif atau dikorupsi. Dana-dana tersebut sebaiknya disalurkan bersama dengan pengawasan dari institusi pemberi pinjaman, dan sesuai dengan sasaran pembangunan pemerintah daerah. Hal tersebut akan memungkinkan pemerintah daerah dan propinsi menggunakan tambahan penerimaan ini secara efektif dan transparan.

BP telah mulai mendiskusikan dengan USAID, DFID dan UNDP berkaitan dengan dukungan pengembangan kapasitas pemerintahan di Papua, serta telah mengajukan kerjasama

dengan USAID untuk memberikan dukungan kepada pemerintahan sipil di Papua. Panel merekomendasikan kepada BP untuk memberikan dukungannya terhadap program-program tersebut. Sebagai satu pilihan tambahan, BP dapat meminta untuk dijadikan sebagai proyek percontohan di bawah *Global Compact* (Perjanjian Global) Sekjen PBB Kofi Annan, dimana terdapat kerjasama yang menantang untuk mengikuti prinsip-prinsip sebagaimana tergambar dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Prinsip-prinsip Dasar tentang Hak-hak Pekerja oleh Organisasi Buruh Internasional dan Prinsip-prinsip Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan.

Merupakan sesuatu hal penting adanya struktur pemerintahan yang efektif dan transparan di Papua sehingga manfaat dari Proyek Tangguh akan dapat dirasakan secara penuh dan langsung. Apabila manfaat tersebut tidak dapat dirasakan oleh masyarakat Papua, maka BP mungkin akan memikul kesalahan akibat kegagalan pemerintah dan akan mengakibatkan tentangan terhadap proyek.

Rekomendasi:

- **Memberikan dukungan sedini mungkin dan nyata terhadap wilayah kepala burung dan propinsi Papua di bidang pendidikan, perawatan kesehatan, pengembangan kapasitas dan pelatihan kerja. Dukungan secara dini dari BP tersebut akan membantu mengurangi tentangan-tentangan terhadap proyek sebagai hasil dari penundaan penerimaan dana otonomi khusus.**
- **Bekerjasama erat serta mengupayakan dukungan dari USAID (Badan Pembangunan Internasional Amerika), DFID (Departemen Pembangunan Internasional Inggris) dan UNDP (Program Pembangunan PBB) untuk menyusun program pengembangan kapasitas pemerintahan di Papua, sehingga penerimaan dapat digunakan secara penuh.**

- **Terlibat dalam diskusi dengan Pemerintah Indonesia dan pimpinan daerah di Papua berkaitan dengan kemungkinan adanya kredit dari luar negeri untuk memajukan dan memuluskan aliran penerimaan keuangan yang didapat dari proyek bagi Propinsi Papua.**

VI. Pengembangan Masyarakat

BP akan memberi manfaat terbesar kepada masyarakat Papua dan penduduk di wilayah Kepala Burung jika dapat melanjutkan upaya-upaya pengembangan masyarakatnya dibidang pendidikan, kesehatan dan penyediaan pekerjaan secara berkesinambungan. Kebutuhan akan pendidikan yang lebih baik merupakan hal yang penting di seluruh Papua, dari Tanah Merah ke Jayapura, baik pendidikan dasar maupun menengah, juga pelatihan teknik dan pendidikan tinggi. Banyak hal yang dapat dipilih, termasuk penyediaan fasilitas dan perlengkapan pendidikan dasar yang lebih baik di DAV; meningkatkan fasilitas untuk SLTP di daerah-daerah terkena dampak di Teluk Bintuni; mendukung pembangunan SLTA di wilayah Teluk Bintuni (dimana pada saat ini belum ada); pemberian beasiswa dan insentif kepada guru-guru yang menempuh pendidikan guru di Manokwari dan Jayapura dan bersedia kembali ke wilayah Kepala Burung; pemberian bonus kepada guru-guru yang bersedia mengabdikan dirinya di wilayah ini; dukungan kepada departemen dan fakultas pendidikan dan kesehatan di Tingkat Universitas di Manokwari dan Jayapura, khusus bagi guru yang kembali ke daerah Kepala Burung; mendukung program-program belajar ke luar negeri dan menyediakan pelatihan bahasa Inggris bagi fakultas di universitas-universitas di Manokwari dan Jayapura; dan penyediaan beasiswa atau jabatan guru (*endowed chairs*) di bidang yang penting, seperti teknik, lingkungan kelautan ataupun kehutanan. Panel merekomendasikan bahwa pilihan-pilihan tersebut bisa dipertimbangkan, sehingga semua pihak dapat memberikan dukungan penuh bagi kesempatan pendidikan.

BP seharusnya juga mendukung peningkatan kesehatan di wilayah Teluk Bintuni, pelayanan kesehatan di desa-desa pada umumnya sangat terbatas, sedangkan di kota-kota kecamatan kurang memadai. Masalah kesehatan yang sangat pokok adalah Malaria, dimana hal tersebut sangat berpengaruh terhadap anak-anak. Meskipun tingkat kematian anak-anak akibat malaria dalam kategori sedang, namun tetap masih banyak anak yang meninggal pada permulaan umur dan sebagian besar merupakan pengidap dan penderita Malaria. Freeport bahkan telah menyisihkan dana untuk mengendalikan Malaria di Timika dan pemukiman-pemukiman disekitarnya, yang mana telah menurunkan prevalensi Malaria secara dramatis. BP seharusnya mempertimbangkan pembasmian Malaria di DAV dan kota-kota kecamatan. Sebagai tambahan, masyarakat daerah ini tidak mempunyai cukup persediaan obat, fasilitas dan petugas medis. Sehingga penyediaan prasarana kesehatan akan menjadi penting selama tahap konstruksi proyek, ketika ada resiko para pekerja pendatang membawa penyakit menular ke daerah ini, termasuk HIV/ AIDS. Panel merekomendasikan supaya BP mempertimbangkan dukungan langsung untuk pelayanan kesehatan di daerah ini, paling tidak sampai penerimaan keuangan yang cukup mengalir dari Tangguh sehingga memungkinkan pemerintah daerah mendanai kegiatan ini.

Hal lain yang penting bagi kesehatan adalah ketersediaan air bersih. Tokoh-tokoh masyarakat setempat dari Aranday dan Taroy secara khusus telah meminta BP membantu desa-desa di sebelah utara pantai Teluk Bintuni untuk meningkatkan ketersediaan air bersih, dan menatapkannya sebagai daerah kritis yang perlu diperhatikan. Karena sangat pentingnya hal tersebut, maka Panel merekomendasikan kepada BP untuk memberikan bantuan kepada DAV di sektor ini. Untuk memperluas kemungkinan tersebut, maka dukungan BP untuk pendidikan, pelayanan kesehatan dan pelatihan kerja seharusnya dikoordinasikan dan dijalankan bersama

dengan pejabat-pejabat setempat. BP harus berhati-hati supaya tidak diasumsikan sebagai tugas-tugas pemerintah daerah, atau yang dirasakan begitu, seperti yang dilakukan Freeport di Timika.

Panel percaya bahwa BP bisa mendapatkan keseimbangan yang tepat melalui (1) melaksanakan empat rekomendasi-rekomendasi tersebut diatas; dan (2) secara berhati-hati mengkoordinasikan semua bantuan yang ada dan secara bersamaan melakukan upaya-upaya meningkatkan kemampuan pemerintah daerah.

Rekomendasi :

- **Memberikan dukungan secara langsung untuk meningkatkan fasilitas pendidikan dan pengajaran di wilayah Kepala Burung serta pelatihan teknis dan program Pendidikan Tinggi di Manokwari dan Jayapura.**
- **Memberikan dukungan secara langsung untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah Teluk Bintuni termasuk pengendalian malaria di DAV dan di kota-kota kecamatan serta mendanai pasokan obat, fasilitas dan tenaga kesehatan, terutama selama tahap konstruksi proyek.**
- **Karena penting dan kritisnya masalah kesehatan dan pembangunan, maka BP seharusnya menyediakan prasarana air bersih yang dibutuhkan di DAV dan kota-kota kecamatan disekitarnya.**

VII. Keamanan

Keamanan, dan keresahan sebagian besar rakyat Papua berkaitan dengan penugasan militer dalam menangani keamanan di propinsi ini, mungkin menjadi topik yang paling sulit dan sensitif bagi BP. Keresahan ini didasarkan pada sejarah pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh TNI di beberapa wilayah di Indonesia dan di lokasi sekitar fasilitas Freeport di Timika. Panel

mendapatkan informasi bahwa lebih dari 80 % biaya operasional TNI telah di bebaskan kepada bisnis dan fasilitas yang dilindunginya. Namun, pemerintah pusat telah mereorganisasi kepolisian keluar dari struktur TNI, sehingga hanya tinggal militer yang bertugas mempertahankan negara dari ancaman dan melindungi aset-aset vital nasional. Hal tersebut memang belum jelas dan teruji, bagaimana pengaturan baru ini akan bekerja. Terdapat dua isu serius yang muncul: pertama, penugasan TNI dan polisi dalam memberikan pengamanan terhadap Proyek Tangguh; dan kedua, kemungkinan permintaan keuangan langsung dari TNI kepada BP.

Pada saat ini BP Indonesia membangun konsep Keamanan Berbasis Masyarakat yang akan menjadikan masyarakat lokal Papua dalam keamanan dasar dikeliling proyek, sambil menggunakan polisi jika ada gangguan internal yang besar, dan mencadangkan TNI hanya untuk menghadapi ancaman yang paling serius. Dikarenakan pengalaman lampau dengan TNI, banyak yang percaya bahwa konsep ini tidak realistis dan TNI akan menuntut untuk melindungi obyek vital ini dari jarak dekat.

Panel merekomendasikan bahwa BP seharusnya berjalan terus dengan program Keamanan Berbasis Masyarakat, sementara itu tetap menjaga fleksibilitas dalam implementasinya. Pada saat yang bersamaan, BP seharusnya mengkonsultasikan secara tepat hingga mencapai pejabat Polisi dan TNI di level tertinggi, serta menghargai penugasan mereka dalam mengamankan proyek.

BP harus menghindari dua kemungkinan yang ekstrim, yaitu terkait terlalu dekat dengan TNI atau, di sisi lain, digunakan sebagai senjata oleh kekuatan politik yang melawan TNI. Menurut Panel, dicapainya pemahaman awal diantara pejabat tinggi keamanan, militer dan polisi

adalah jalan terbaik bagi BP untuk mewujudkan sebuah Keamanan Berbasis Masyarakat dan menghindari permintaan-permintaan yang tidak terduga atau tidak diinginkan.

Berkaitan dengan hal ini, Panel percaya bahwa konsultasi tingkat tinggi termasuk koordinasi dengan MenkoPolkam, Panglima TNI yang baru dan pejabat-pejabat yang berwenang lainnya ditingkat nasional dan daerah harus dilakukan. Panel menyambut baik pembahasan yang dilakukan bersama dengan Kapolda Papua, yang menjelaskan reorganisasi terakhir dari kepolisian yang keluar dari struktur TNI, dan menjelaskan pandangannya bahwa keputusan pemerintah pusat diperlukan untuk mengimplementasikan paradigma baru yang mana akan melibatkan masyarakat sebagai basis keamanan, polisi sebagai pendukung utama dan TNI hanya untuk menangani ancaman serius. Ada yang lain yang mendesak kontak awal di tingkat yang tinggi. BP harus menyampaikan kepentingannya terkait dengan struktur ini dan menjelaskan pentingnya bagi proyek, bagi kepemimpinan TNI dan bagi pejabat tinggi keamanan lainnya, serta harus menempatkan proposalnya dengan tepat dengan kewajiban TNI untuk melindungi aset-aset vital nasional.

Sejauh mungkin, BP harus memperjuangkan basis yang kuat untuk bekerjasama, yang didukung oleh jajaran tinggi politik dan militer, yang menguraikan garis besar konsep Keamanan Berbasis Masyarakat dan mendefinisikan peran TNI di dalamnya. Jika mungkin, BP harus bekerja keras untuk mencapai basis ini sebelum BP membuat keputusan akhir untuk melanjutkan proyek.

Sebaiknya BP mendukung pelatihan polisi dan perbaikan prasarana melalui beberapa cara. BP bisa mendorong pemerintah pusat atau pemerintah propinsi Papua untuk mengalokasikan sebagian dari pendapatan proyek kepada pelatihan dan perbaikan prasarana polisi. BP juga dapat mendukung program-program, seperti yang telah dijalankan oleh Komite

Palang Merah Internasional (ICRC), yang memberikan pelatihan dibidang hukum kemanusiaan, prosedur untuk menghindari kekuatan , dan berbagai alternatif dari penggunaan kekuatan bagi petugas militer di Papua dan polisi.

Bagaimanapun, jika ada permintaan TNI tentang dana untuk mendukung keamanan di Tangguh, Panel dengan jelas berpendapat bahwa BP seharusnya tidak menyetujui permintaan untuk dukungan keuangan secara langsung.

Rekomendasi :

- **Dengan mengikuti konsep Keamanan Berbasis Masyarakat secara fleksibel dan menghargai perlunya menempatkan secara tepat pendekatan ini dengan kewajiban-kewajiban TNI untuk melindungi aset-aset penting nasional.**
- **Melakukan konsultasi tingkat tinggi dengan pejabat tinggi politik, militer dan polisi tentang pelaksanaan dari konsep-konsep, dan bertujuan, jika memungkinkan, untuk memantapkan basis kuat untuk bekerjasama dengan pejabat tinggi politik dan militer sebelum BP membuat keputusan akhir untuk melanjutkan proyek.**
- **Mendukung program-program yang memberikan pelatihan kepada militer dan polisi sebagaimana yang dilakukan oleh Komite Palang Merah Internasional (ICRC).**
- **Tidak menyetujui pemberian dana langsung kepada TNI dan Polisi.**

VIII. Pelatihan dan Memberikan Pekerjaan pada Masyarakat Papua

BP telah berjanji untuk menawarkan pekerjaan sementara di Proyek Tangguh kepada satu orang anggota dalam setiap keluarga di DAV. Merupakan hal penting bagi BP untuk memenuhi janji tersebut. Namun pada saat ini akan sulit bagi BP untuk memberikan pekerjaan pada banyak orang, mengingat kekurangan pelatihan dan pengalaman kerja. Meski demikian, untuk

meningkatkan keberhasilannya, BP seharusnya melaksanakan program perekrutan tenaga kerja dan pelatihan untuk proyek yang berhubungan dengan posisi-posisi di semua tingkatan, termasuk keamanan masyarakat untuk tahapan konstruksi dan operasi. Panel juga merekomendasikan bahwa BP harus mendorong kontraktornya supaya secara signifikan membuat upaya melatih dan merekrut masyarakat suku Papua.

Penerimaan orang-orang Papua untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi mungkin akan menimbulkan masalah tersendiri ketika pekerjaan tahap konstruksi tersebut berakhir, kemungkinan pada tahun 2005. Panel mendukung tujuan BP yang berkelanjutan dalam Strategi Sosial Terpadu, yang mana memandang perlunya menyediakan kesempatan usaha jangka panjang disektor swasta kepada masyarakat terasing, dan menekankan pentingnya pengembangan kesempatan untuk berpraktek ketika Tahap Konstruksi sedang berjalan.

Panel juga melihat bahwa terdapat keperluan mendesak untuk menyediakan pelatihan atau peralatan sehingga memungkinkan masyarakat Teluk Bintuni – terutama kaum mudanya – meningkatkan mata pencaharian dan memperluas kesempatan untuk mengembangkan karir mereka, yang mana pada saat ini sangat terbatas. Tampaknya hanya sumberdaya penangkapan udang saja yang menjadi sumber pendapatan dari luar. Hampir seluruh kegiatan ini dilaksanakan dengan perahu sampan. Pembangunan sarana dermaga pengkapalan LNG dan dermaga kombo (*combination pier*) akan mengganggu pola penangkapan ikan di perairan sebelah selatan Teluk Bintuni. Hal serupa dapat ditimbulkan dari keadaan anjungan Kilang LNG dan lalu lintas kapal *tanker*. BP seharusnya mempertimbangkan bantuan modernisasi kapal penangkapan ikan bagi nelayan setempat sebagai kompensasi bergesernya lokasi penangkapan ikan yang disebabkan oleh adanya proyek. BP seharusnya juga melanjutkan untuk memberikan pelatihan kepada

penduduk desa setempat dalam ketrampilan usaha, seperti pertukangan kayu dan keahlian listrik, untuk memberikan ketrampilan bagi pekerjaan alternatif yang berkelanjutan.

Rekomendasi:

- **Melanjutkan memberikan pelatihan kepada penduduk desa setempat dalam bidang ketrampilan dagang, seperti pertukangan kayu.**
- **Melaksanakan program pelatihan dan perekrutan pekerjaan bagi masyarakat Papua di wilayah tersebut dengan membantu mengaktualisasikan janji tentang pekerjaan sementara kepada satu orang anggota disetiap keluarga di DAV.**
- **Mendukung modernisasi perahu penangkapan ikan setempat dengan menyediakan bantuan berupa perahu dan peralatan lainnya yang lebih baik.**

IX. Hubungan Baik dengan Pertamina dan Badan Pelaksana Body (“Balak”) Baru

BP dan Pertamina mempunyai hubungan yang kompleks dan berkembang. Keduanya merupakan rekanan dibawah PSC, dan Pertamina mempunyai kontrol manajemen terhadap semua pengeluaran BP. Undang-undang Migas yang baru (UU No. 22 tahun 2001) akan secara pokok memprivatisasi Pertamina pada bulan November 2003, diwaktu mana badan baru pemerintah akan telah terbentuk, yang akan menangani semua kontrak migas dan mempunyai kontrol manajemen terhadap kegiatan BP Tangguh serta akan menjadi agen pemerintah dalam penjualan bagi hasil produksi gasnya. Badan pelaksana, yang dikenal sebagai “Balak”, bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden. Semua karyawan Pertamina yang terlibat dalam pengelolaan bagi hasil akan di pindahkan ke “Balak”. Kepala Balak yang pertama adalah Bapak Rachmat Sudibjo, yang pada saat ini menjabat sebagai Dirjen Migas di Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral. Panel mendapat informasi dari Bapak Sudibjo bahwa badan

baru tersebut akan sedikit melepas kontrolnya terhadap BP, melakukan pemeriksaan paska audit terhadap biaya operasi dan tidak meminta pra persetujuan dari pengeluaran-pengeluarannya.

Hubungan BP Indonesia dengan Pertamina adalah melalui Manajer Proyek Bapak Yoga Suprpto. Kerangka kerjasamanya saat ini terlihat rapuh, dan dapat berubah dengan berpindahya Bapak Yoga ataupun perpindahan fungsi kepada “Balak” yang baru. Panel merekomendasikan supaya BP membangun hubungan kerja di tingkat tertinggi dengan Pertamina dan Balak, dan agar BP Indonesia memantau secara dekat kebijakan “Balak” dan mengembangkan hubungan kerja yang erat dengan Bapak Sudibjo dan pejabat tinggi lainnya.

Rekomendasi:

- **Memperkuat dan memperluas hubungan baik dengan pejabat tinggi di Pertamina sehingga memberikan keseimbangan dalam pengembangan hubungan baik.**
- **Memantau secara erat dan mengembangkan hubungan baik dengan anggota-anggota dari badan regulator baru yang akan mengawasi kegiatan Tangguh sesudah November 2003.**

X. Menangani Kegiatan Konstruksi

Tahap yang paling sensitif sepanjang umur proyek adalah Tahap Konstruksi, ketika sebanyak 5000 orang dipekerjakan di wilayah Teluk Bintuni. Panel mendukung setiap tujuan untuk mengurangi dampak buruk dari migrasi pendatang ke wilayah Teluk Bintuni, terutama rencana untuk menempatkan pekerja di Manokwari, Fak-Fak dan Sorong ketika mereka tidak dalam waktu kerja, mengisolasi mereka dari kemungkinan keluar dari lokasi proyek, dan untuk menahan kemungkinan adanya pembangunan jalan menuju lokasi proyek. Namun, dengan segala keterbatasan yang ada, Panel memperkirakan bahwa ketegangan tetap akan muncul,

seperti masalah-masalah antar etnik dan antar kelompok, oleh karena adanya kesulitan penerapan pengaturan-pengaturan yang disebutkan diatas. Sebagai tambahan, perhatian akan budaya dan kesehatan sangat memungkinkan, termasuk penggunaan alkohol atau madat dan mulai munculnya HIV/AIDS di daerah tersebut. Panel menekankan pentingnya program penyuluhan awal, kepada semua desa-desa dan kota yang terpengaruh, untuk menginformasikan kepada rakyat di daerah akan bahaya tersebut. Adalah juga penting bahwa kontraktor BP, yang akan mempunyai kontrol manajemen kepada banyak pekerja, menganggap serius kebijakan yang dianut BP. BP seharusnya membicarakannya dengan masing-masing kontraktor untuk menekankan pemahaman sepenuhnya dan pentingnya Etika Tingkah Laku Kontraktor, dengan meminta kepada setiap kontraktor secara tertulis untuk tunduk pada kebijakan BP yang ditetapkan, untuk membatasi dampak dari para pekerja pendatang. BP seharusnya memastikan bahwa semua kontraktor mengikuti dengan ketat Etika Tingkah Laku tersebut dan harus menjatuhkan sanksi nyata bagi setiap pelanggaran serius.

Rekomendasi:

- **Melaksanakan dengan tegas program-program untuk membatasi kegiatan cuti pekerja konstruksi di dan sekitar daerah Teluk Bintuni.**
- **Merundingkan secara erat dengan para kontraktor untuk menekankan pentingnya kebijakan dan memastikan bahwa kontraktor mengikuti dengan ketat Etika Tingkah Laku Perusahaan.**
- **Menyediakan program-program pendidikan kepada semua desa dan kota yang terpengaruh untuk menginformasikan bahaya penyakit menular, alkohol dan penggunaan obat-obat terlarang.**

XI. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup dan ekosistem di Teluk Bintuni harus dilindungi. Sebagai tambahan untuk mengurangi dampak lingkungan di atau sekitar lokasi proyek, Panel merekomendasikan untuk meningkatkan upaya konservasi di sekitarnya. Hutan bakau (mangrove) yang terluas di kawasan Asia Tenggara terletak 80 kilometer disebelah timur dari proyek didalam Cagar Alam; daerah tersebut akan menjadi titik perhatian dari Proyek Pelopor Aksi Keanekaragaman Hayati. Panel mendukung upaya ini sebagai alat ukur yang signifikan yang akan memberi manfaat bagi keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup.

Hingga saat ini, AMDAL belum lengkap atau disetujui oleh Pemerintah Indonesia. BP, pejabat pemerintah dan LSM-LSM telah membuat kesepakatan dalam diskusi yang berkaitan dengan beberapa aspek yang spesifik dalam AMDAL. Panel memahami bahwa komitmen-komitmen yang ada dalam AMDAL bersifat mengikat secara hukum. Rekomendasinya bahwa BP melaksanakan setiap persyaratan dalam AMDAL secara penuh dan melaksanakannya dengan tepat waktu.

Panel juga diinformasikan oleh Gubernur Papua yang berjanji kepada masyarakat desa setempat bahwa tanah dimana terletak lokasi proyek akan dikembalikan kepada mereka ketika fasilitas tersebut selesai dan ditutup. Namun, meskipun Tahap Paska Operasi dibahas dalam dokumen AMDAL, terdapat kemungkinan tidak ada persetujuan spesifik yang berkaitan dengan status tanah pada tahap itu. Panel merekomendasikan bahwa BP mengklarifikasi hal tersebut pada saat ini dengan komitmen untuk memindahkan kembali semua fasilitas dan perlengkapannya pada saat selesainya kegiatan dan menangani kerusakan penggunaan lahan sehingga kewajibannya menjadi ramah lingkungan dan tidak membingungkan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan hal ini tidak akan berkembang menjadi kontroversi dimasa mendatang.

Rekomendasi:

- **Menjaga dan menyelamatkan keanekaragaman hayati di wilayah ini dan mendukung kepeloporan program aksi keanekaragaman hayati di Cagar Alam.**
- **Mendukung pengukuran untuk menentukan pengelolaan lingkungan yang layak dari fasilitas yang ada dan melindungi Teluk Bintuni dari berbagai penurunan kualitas air atau dampak lainnya yang dapat mempengaruhi lingkungan laut dan matapencaharian penduduk setempat.**
- **Melaksanakan semua persyaratan dari AMDAL secara penuh dan dalam kerangka waktu yang tepat.**
- **Berkomitmen untuk memindahkan semua fasilitas BP dan perlengkapannya pada saat penghentian kegiatan dan menangani setiap kerusakan akibat penggunaan tanah.**

XII. Informasi Publik

Dari segi besaran dan jenis, Proyek Tangguh merupakan suatu hal yang unik di Papua. Pemerintah dan masyarakatnya kurang mengenal BP beserta kebijakan dan tujuan-tujuannya. Preseden-preseden yang ada di Papua mempunyai potensi untuk menimbulkan kesalahmengertian dan salah pandang tentang BP. Oleh karena itu, sangat penting bagi BP untuk menyampaikan posisinya secara umum, jelas dan tepat.

Pertama, Panel merekomendasikan bahwa BP melanjutkan membuat dan menyebarkan informasi dan materi yang memuat penjelasan berbagai aspek proyek dan program-program BP di Indonesia dan Papua. Informasi ini seharusnya dalam bentuk yang dapat dimengerti dan dapat digunakan oleh masyarakat setempat dan perwakilannya, juga kalangan pemerintah dan LSM.

Sejauh mungkin, informasi ini seharusnya menjelaskan kepada publik tentang berbagai macam aspek dari proyek dan juga menyediakan beberapa wawasan yang berkaitan dengan peningkatan kegiatan dan komitmen-komitmen yang pasti lainnya. Secara bersamaam bahan seharusnya juga dibangun dan disiapkan untuk press, lokal maupun internasional. Panel percaya bahwa hal ini merupakan jaminan terbaik BP untuk mengatasi kesalahpengertian dan ketidakpercayaan yang tinggi.

Kedua, Tangguh seharusnya selalu siap untuk menjelaskan secara tepat dan akurat setiap acara yang tidak direncanakan dan tidak diharapkan, termasuk keadaan darurat, kecelakaan atau penundaan. Peristiwa semacam ini sebaiknya tidak dijelaskan dulu oleh pihak yang lain, secara kurang akurat, sehingga BP harus menanggapi secara defensif setelah persepsi awalnya telah terbentuk.

Rekomendasi;

- **Memproduksi dan menyebarkan bahan-bahan tetntang proyek dan program-program BP untuk memberikan informasi akurat dan terbaru serta menghindari kesalahmengertian dan ketidakpercayaan.**